

PENDAMPINGAN BINA AKSES JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA NEGARA BAGI PENYANDANG DIFABEL SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI DEMOKRASI

Ama Farida Sari
Prodi PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
Email amafaridasari@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi warga negara tidak hanya dilakukan bagi yang memiliki fisik sempurna, tetapi juga mereka yang memiliki kekurangan baik secara fisik, motorik, maupun sensorik seperti para penyandang difabel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa Tengah. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan fokus penelitian pada pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi warga negara pada penyandang difabel meningkat seperti partisipasi dalam pemilu, terlibat dalam kegiatan sosial, pelatihan serta pengembangan keterampilan tenaga kerja. Pendampingan bagi para penyandang difabel dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan aksesibilitas bagi para difabel dalam upaya perwujudan nilai demokrasi dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai sila ke dua Pancasila bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dan setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saran, perwujudan nilai-nilai demokrasi sangat banyak sekali bentuknya dan dilakukan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah partisipasi pemilu. Pada penyandang difabel, pendampingan dari pihak tertentu dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri agar mereka merasa setara dan mendapatkan keadilan yang sama. Sehingga perlu kerjasama dan pendampingan antara lingkungan sekitar, pemerintah dan komunitas mereka sendiri. Pendampingan terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat menambah rasa percaya diri, partisipatif dan kesetaraan antar warga negara.

Kata Kunci: *Bina Akses, Difabel, Partisipasi, Demokrasi*

PENDAHULUAN

Dalam proses demokrasi yang dijalankan oleh setiap negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis maka peran aktif dari warga negara sangatlah diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tujuan sistem pemerintahan yang dianut. Setiap negara memiliki cara tersendiri dalam proses pelaksanaan demokrasi yang digunakan sebagai ciri khas dan membedakan dengan negara lain. Karakteristik atau ciri khas tersebut dituangkan dalam berbagai program yang dapat melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kegiatan yang mengandung unsur nilai demokrasi banyak sekali, salah satu diantaranya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum yang secara umum adalah simbol dari

demokrasi dan menjadi salah satu dari banyaknya kegiatan demokrasi yang jelas melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dalam memberikan hak suaranya untuk menentukan pemimpin yang mereka pilih mulai dari pemilihan kepala daerah, dewan perwakilan hingga dalam memilih pemimpin negara atau presiden.

Warga negara yang terlibat dalam proses demokrasi adalah seluruh masyarakat tanpa terkecuali tidak memandang golongan bahkan tidak membedakan apakah mereka memiliki fisik yang sempurna maupun kekurangan seperti para difabel, partisipasi mereka semua sangatlah penting untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Partisipasi menurut Zamroni (2013: 15) yakni keikutsertaan aktif warga masyarakat dalam proses politik. Partisipasi mulai dari kegiatan nonpartisan seperti aktif dalam kegiatan kampung, dikalurahan dan berbagai kegiatan nonpartisan lain. Partisipasi warga negara, khususnya bagi para penyandang difabel membutuhkan penanganan khusus atau tambahan yang berbeda dengan mereka yang memiliki fisik sempurna, penanganan khusus ini bukan berarti membedakan antar setiap warga negara, namun justru dalam rangka kesetaraan warga negara yang memperoleh perlakuan yang sama dalam proses demokrasi dan mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila.

Pendampingan khusus bagi para penyandang difabel akan lebih maksimal ketika pemerintah melibatkan mereka secara langsung baik dalam proses perencanaan kebutuhan hingga pada pelaksanaannya. Melalui pendampingan, maka para penyandang difabel akan memperoleh hak yang sama baik itu dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara utamanya dalam partisipasi mereka sebagai perwujudan nilai demokrasi yang menyeluruh.

Salah satu pendampingan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah bagi kaum difabel adalah pendampingan aksesibilitas oleh Bina Akses Jawa Tengah. Melalui program pendampingan, Bina Akses memberikan ruang bagi para penyandang difabel untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi mereka dalam proses demokrasi di Indonesia karena mereka menyadari bahwa para difabelpun adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia, dan partisipasi warga negara adalah penting, juga sebagai wujud dari proses demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini akan menyajikan data deskripsi. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2010:4).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pendampingan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Bina Akses Jawa Tengah untuk aksesibilitas bagi penyandang difabel sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi serta latar belakang pembentukan pendampingan bagi para penyandang difabel oleh Bina Akses Jawa Tengah. Sumber data penelitian adalah data primer yang bersumber dari wawancara dengan penyandang difabel dan para penggerak awal terbentuknya Bina Akses Jawa Tengah, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur buku atau studi kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan teknik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai organisasi masyarakat bergiat atas motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran solidaritas sosial. Sebutan LSM ini belakangan berkembang demikian rupa sehingga memiliki konotasi khas. Sebagai salah satu bentuk wadah yang menyalurkan peran serta masyarakat, corak kegiatannya khas, karena dilandasi oleh motivasi yang khas pula (Hagul, 1992:139). Dalam kegiatannya, LSM biasanya bergerak dengan penuh rasa solidaritas, kesetiakawanan sosial, dan memperoleh kesetaraan karena meras senasib sepenanggungan dengan mereka yang terlibat didalamnya.

Banyaknya LSM yang berkembang di Jawa Tengah saat ini salah satunya adalah Bina Akses yang membantu pendampingan khusus para penyandang difabel atau disabilitas dalam perwujudan nilai-nilai demokrasi yang berbentuk partisipasi warga negara. Bina Akses juga tersebar diseluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang dimana seluruh anggota kepengurusannya merupakan penyandang difabel, mulai dari tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu maupun tuna netra. Bina Akses memberikan pendampingan kepada para penyandang difabel dalam memberikan akses utamanya dalam partisipasi pemilu atau pilkada

diwilayahnya sebagai wujud solidaritas, kesetaraan warga negara dan kontribusi mereka meskipun memiliki keterbatasan.

Istilah difabel terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu *diffable*. Difabel merupakan istilah yang berasal dari *people with different abilities*, yang kemudian di-Indonesiakan menjadi difabel. Difabel ini adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda dan keterbatasan baik dari fungsi gerak tubuhnya maupun fisiknya. Kemampuan mereka menjadi berbeda karena mereka memiliki kelebihan dan potensi diri yang tidak kita miliki, serta kemampuan mengoptimalkan setiap potensi diri sekecil apa pun. Istilah "difabel" juga memberi peluang untuk memperhatikan masyarakat dengan kondisi berbeda dan spesifik. Istilah difabel menawarkan wacana lebih bijak dan perspektif berbeda dibanding penyandang cacat yang mempersepsikan sesuatu yang gagal produksi, bahkan abnormal. Istilah DIFABEL (*different ability*) istilah yang lebih *empowering* dari pada *disable*, lebih dihormati dari pada penyandang cacat, untuk diterapkan pada bangunan dan lingkungan (Leonardo, 2010:11).

Memunculkan rasa percaya diri bagi para difabel bukanlah hal yang mudah, bahkan orang yang memiliki fisik secara normal saja belum tentu dapat percaya diri sepenuhnya, apalagi jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik yang sebenarnya sedikit banyak lingkungan juga mempengaruhi dalam kemandirian serta percaya diri mereka untuk tampil sejajar dengan masyarakat pada umumnya. Bina Akses sebagai lembaga swadaya masyarakat memberikan pendampingan dengan berbagai macam kegiatan yang mendukung para penyandang difabel untuk bergerak dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi di masyarakat utamanya dalam pemilihan pemilu dan pilkada.

Secara terminologis, partisipasi adalah manifestasi dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi di mana perluasan yang direncanakan diupayakan dari bawah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan komunitasnya. Antusiasme untuk mengintegrasikan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan demokrasi tidak terbatas pada AS, tetapi juga banyak negara lain memiliki inisiatif luas dalam melibatkan publik dalam proses pemerintahan (Rusnaini, 2016:807). Dalam upaya demokrasi yang melibatkan publik saat mengambil kebijakan atau perencanaan pembangunan, pemerintah memang seharusnya melibatkan komponen masyarakat karena kebijakan dan pembangunan tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, tak terkecuali juga dalam hal ini adalah para penyandang disabilitas. Bina Akses dalam mendampingi para penyandang difabel juga ikut berperan dalam kegiatan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, misalnya mereka

mengadakan pertemuan musyawarah dengan para calon pemimpin daerah atau dewan yang akan maju dalam pemerintahan, Bina Akses dan para penyandang difabel mengusulkan beberapa peraturan atau pembangunan untuk akses mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Bina Akses juga mengadakan pelatihan simulasi pemilihan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk pemilih pemula para penyandang difabel yang bekerjasama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dengan menyediakan pelatihan dan pelayanan untuk memudahkan akses mereka dalam memberikan hak pilih kepada para kandidat calon pemimpin pemerintahan terutama ketika menjelang pemilu dan pilkada seperti yang sudah dilaksanakan pada awal bulan Juni 2018 sebagai persiapan pemilu Gubernur Jawa Tengah 2018.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bina Akses merupakan perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, terutama meningkatkan rasa percaya diri dan kesetaraan antar warga negara bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan partisipasi warga negara sebagai unsur tercapainya nilai demokratis seperti yang diungkapkan oleh Delany dalam Rusnaini (2016:367) bahwa demokrasi terdiri dari konstitusionalisme, pluralisme, dan kewarganegaraan. Konstitusionalisme merupakan aturan hukum yang membatasi domain negara (yaitu peran negara yang berlebihan dalam konteks kontrak sosial). Pluralisme mengacu pada representasi kepentingan publik. Kewarganegaraan mewakili partisipasi publik dalam pemerintahan dan / atau pembuatan kebijakan yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Sejalan dengan hal tersebut pentingnya partisipasi warganegara bahkan perlunya agen dalam masyarakat juga diungkapkan oleh Sairin (2002:258) yang menyebutkan bahwa pendekatan partisipatif ini perencana, *agents* dan masyarakat yang dijadikan sasaran pembangunan bersama-sama merancang dan emikirkan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga jelas peran pendampingan yang diberikan oleh Bina Akses sangatlah membantu bagi para penyandang difabel, terlebih rasa percaya diri mereka akan lebih meningkat dan rasa solidaritas juga berkembang jika mereka bersama dengan orang-orang yang sama dengan mereka, karena mereka merasa mereka bukan hanya memiliki keterbatasan dan lingkungan yang sama, namun juga ada motivasi yang sama untuk berkembang lebih baik.

Adanya perlindungan hukum dan jaminan bagi para penyandang difabel juga merupakan perwujudan nilai demokrasi dalam pelayanan masyarakat serta penyediaan sarana juga pembangunan yang diberikan pemerintah karena memperhatikan seluruh kebutuhan terutama yang menyangkut aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Perwujudan ini

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah 43/1998 tentang Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (1997/ 1998): Secara khusus mengatur penyandang disabilitas. Pasal 14 menegaskan kuota 1 persen untuk ketenagakerjaan penyandang disabilitas di perusahaan pemerintah dan swasta. Pasal 5 menyatakan bahwa “setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan”. Pasal 6 mendaftar berbagai hak bagi penyandang disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, perlakuan yang sama, aksesibilitas, rehabilitasi. Selain itu juga ada Undang-Undang No.25/2009 tentang Layanan Publik (2009): Pasal 29 menyatakan bahwa penyedia layanan umum harus memberikan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan dan terakhir jelas diatur dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999): Pasal 41(2) menyatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki hak atas fasilitas dan perlakuan khusus.

Dengan adanya pendampingan oleh Bina Akses bagi para penyandang difabel dan juga payung hukum yang jelas maka perwujudan demokrasi akan sangat terasa serta tidak ada perbedaan antara mereka yang memiliki fisik sempurna dan kurang sempurna. Demokrasi bukan hanya sebagai wacana saja namun juga pengaplikasiannya dengan melibatkan masyarakat, partisipasi, agen, adanya saluran untuk mencapai tujuan seperti yang dituliskan oleh Zamroni (2013:15) dalam bukunya yang berjudul pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultur yang menyebutkan bahwa sistem politik demokrasi akan berjalan baik apabila memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi yakni antara lain: (1) Konsensus; (2) Partisipasi; (3) Akses; (4) Tanggap; (5) Peran Mayoritas; (6) Kedaulatan Parlemen; (7) Partai Pemegang Pemerintahan; (8) Pluralisme; (9) Federalisme; (10) Presidensialisme; (11) Check and Balances.

Kerjasama, solidaritas dan pendampingan antar warga negara terutama sesama penyandang disabilitas akan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mewujudkan nilai-nilai demokrasi semakin hidup dan berkembang di Indonesia. Pendampingan yang dilakukan oleh Bina Akses juga bukan hanya untuk nilai demokrasi namun juga nilai-nilai Pancasila dalam yang memang seharusnya terinternalisasi dalam setiap diri warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Perwujudan nilai demokrasi memang dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya yaitu partisipasi warga negara yang ikut serta dalam kegiatan sosial

masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti bukan hanya terbatas bagi mereka yang memiliki fisik sempurna namun juga mereka para penyandang difabel yang memiliki rasa percaya diri dan juga keinginan untuk berperan dalam partisipasi tersebut dan dalam mencapai itu semua perlu adanya motivasi dan pendampingan agar memudahkan aksesibilitas bagi mereka seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Akses Jawa Tengah. Karena demokrasi adalah untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali termasuk didalamnya adalah mereka para penyandang difabel yang memiliki kedudukan yang setara dan hak yang sama dengan warga negara yang lain.

Saran Saran, perwujudan nilai-nilai demokrasi sangat banyak sekali bentuknya, semua dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang salah satunya adalah partisipasi pemilu. Pada penyandang difabel, pendampingan dari pihak tertentu dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri agar mereka merasa setara dan mendapatkan keadilan yang sama. Jika bukan dari orang sekitar yang memberikan penguatan, maka motivasi dan rasa percaya diri para penyandang difabel tidak akan berkembang, sehingga perlu kerjasama dan pendampingan antara lingkungan sekitar, pemerintah yang memberikan pelayanan dan komunitas mereka sendiri. Pendampingan terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat terus menambah rasa percaya diri, partisipatif dan kesetaraan antar warga negara..

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada para penggagas terbentuknya Bina Akses Jawa Tengah yang dipelopori oleh Ir. Roni Yudi P, Dra. Emiliana SP, M.Si Guru Besar UNTAG dan Ketua Bina Akses Jawa Tengah Bapak Sugeng Widodo yang sangat membantu dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Dian Desa
- Leonardo, Nasrudin Dewang. 2010. *Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat*, Jurnal PLANESATM Vol. 1, No. 1, Mei 2010
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Peraturan Pemerintah 43/1998 tentang Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

- Rusnaini, 2016, *Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia*, 1st Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship (GCBME-16), Advances in Economics, Business and Management Research, volume 15, Atlantis Press
- Rusnaini, 2016, *Democracy and Local Autonomy Policy in Indonesia: A Particularist Perspective*, 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015), Published by Atlantis Press
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No.25/2009 tentang Layanan Publik
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Ombak